

Mekanisme Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik

Inayah Wulandari

Universitas Negeri Surabaya, inayah.18088@mhs.unesa.ac.id

Maya Mustika Kartika Sari, S.Sos.M.IP.

Universitas Negeri Surabaya, mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan menjadikan desa wisata Setigi mampu berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan dan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sekapuk. Tipe penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang terdiri atas tiga masyarakat Desa Sekapuk, satu kepala desa dan satu manajer BUMDesa. Adapun teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi dengan mekanisme secara kondisional. Partisipasi masyarakat sudah dikonstruksi oleh struktur untuk kemudian dilaksanakan oleh masyarakat. Kepala desa terpilih sebagai pemangku kebijakan sekaligus aktor intelektual dalam pengembangan desa wisata Setigi menawarkan ide dan gagasannya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, lahirnya kebijakan mengenai desa wisata Setigi tidak berasal dari inisiatif masyarakat melainkan hadir karena ada pemicunya. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui ide dan gagasan yang sudah dikondisikan untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi terjadi secara *top down* dan kondisional.

Kata kunci: mekanisme, partisipasi, kebijakan.

Abstract

Community participation is the key in implementing Setigi tourism village policies. With community participation in every policy implementation, Setigi tourism village is able to develop into a sustainable tourist destination and has an impact on the social and economic life of the Sekapuk Village community. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. There were five informants in this study, consisting of three people from Sekapuk Village, one village head and one BUMDesa manager. The data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The results showed that there was community participation in the implementation of the Setigi tourism village policy with a conditional mechanism. Community participation has been constructed by the structure and then implemented by the community. The elected village head as a policy holder as well as an intellectual actor in the development of the Setigi tourist village offers his ideas and ideas to the community. Therefore, the birth of a policy regarding the Setigi tourist village did not come from a community initiative but was present because there was a trigger. This also shows that the village government seeks to empower the community through ideas and ideas that have been conditioned to be implemented by the community. Therefore, it can be concluded that the mechanism of community participation in the implementation of the Setigi tourism village policy occurs in a top-down and conditional manner.

Keywords: mechanism, participation, policy.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap negara tidak akan bertahan apabila tidak melakukan pembangunan. Tujuan utama pelaksanaan pembangunan itu sendiri adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Demikian pula yang dilakukan oleh Negara Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa tujuan

Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan

pembangunan masyarakat seluruhnya (Ginanjari, 2006:23). Dalam pembangunan nasional Indonesia, pariwisata menjadi salah satu yang diutamakan. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Keberhasilan pembangunan di sektor pariwisata tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun juga dapat menjamin kelestarian sumber daya alam dan kebudayaan serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan yang diharapkan. Pengembangan sektor pariwisata harus memikirkan dampak jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak hanya diukur dan dievaluasi berdasarkan keuntungan di bidang ekonomi yakni peningkatan devisa, melainkan juga dilihat kontribusinya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, pelestarian alam atau lingkungan, pengembangan kebudayaan, perbaikan atas citra bangsa, serta mempererat rasa kesatuan dan cinta tanah air. Definisi ini sesuai dengan yang dijabarkan oleh *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) dimana pariwisata harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah..

Pariwisata memiliki posisi strategis pada sektor ekonomi di Indonesia. Negara yang memiliki julukan *The emerald of the equator* dan Negara Seribu Pulau ini memiliki keindahan alam, kebudayaan, dan warisan leluhur yang menakjubkan. Hal tersebut menjadi daya tarik dan nilai jual pariwisata Indonesia di mata dunia. Berdasarkan studi kasus, kunjungan wisata asing ke Indonesia cenderung mengalami peningkatan walau tidak terlalu pesat. Menurut data *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan ke-5 dalam peringkat negara Asia Tenggara yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dengan kunjungan mencapai 13,39 juta wisatawan dan pendapatan sekitar US\$ 14,1 Miliar. Sektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu dari empat penyumbang tertinggi devisa negara. Dikutip melalui *kominfo.go.id*, bahwa pariwisata Indonesia mampu menyumbang sekitar US\$ 10 Miliar devisa negara dan menempati posisi keempat setelah minyak, batu bara, dan kelapa sawit. Pariwisata merupakan industri berbasis kreatif yang lebih ramah lingkungan. Potensi pariwisata Indonesia yang kaya dan beragam harus dikembangkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Optimalisasi ini harus direalisasikan dengan upaya nyata pemerintah dalam pembangunan di sektor pariwisata.

Dalam upaya pembangunan di sektor pariwisata, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membuat strategi melalui program pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, pemerintah mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Salah satu bagian penting dalam strategi wisata berkelanjutan ini adalah pengembangan desa wisata. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, desa wisata diharapkan dapat menekan laju urbanisasi masyarakat desa ke kota karena pengembangan wisata berbasis desa ini akan menggerakkan aktivitas ekonomi pariwisata di pedesaan.

Dikutip dari *kompas.com*, melalui program wisata berkelanjutan, Sandiaga Uno berharap desa wisata dapat menjadi masa depan kepariwisataan Indonesia dan simbol kebangkitan ekonomi Indonesia. Desa wisata diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga dapat menjadi lokomotif perekonomian di Indonesia (Ramadhian, 2020). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan ada 244 desa wisata bersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. terdapat sekitar 1200 potensi desa wisata yang siap dikembangkan secara berkelanjutan karena memiliki potensi nilai kearifan lokal dan nilai kebudayaan kuat.

Hingga tahun 2021, jumlah desa wisata di Indonesia terus meningkat. Dikutip dari *kompas.com*, menurut Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi) Andi Yuwono mengatakan Indonesia memiliki 1.838 desa wisata yang tersebar di penjuru nusantara (Ramadhian, 2021). Dalam mengembangkan desa wisata, ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama mengenai potensi wisata yang tersedia seperti lahan, lokasi, daerah serta ekosistem yang dapat membantu pengembangan destinasi wisata ke depan. Komponen kedua, yaitu minat dan kesiapan masyarakat sekitar. Komponen yang terakhir yaitu ide atau konsep desa wisata yang ditawarkan harus unik dan berbeda dari yang lain. Pengembangan desa wisata harus mengedepankan keikutsertaan masyarakat, karena pengembangan desa wisata harus mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam struktur kehidupan masyarakat dan menyatu dengan tata cara serta tradisi masyarakat setempat.

Sejalan dengan kebijakan implementasi desa wisata, maka partisipasi masyarakat menjadi isu mendasar yang

tidak bisa diabaikan. Partisipasi masyarakat lokal menjadi peluang serta tantangan bagi pengembangan desa wisata. Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa (1) Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, dan gotong royong. (2) Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan keikutsertaan masyarakat desa. Untuk mewujudkan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat maka pemerintah memberikan kebebasan pengelolaan terkait potensi wisata pada setiap daerah. Selain itu, pemberian kebebasan pengelolaan terkait potensi desa juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Kedua peraturan tersebut memberikan peluang kesempatan setiap daerah untuk mengoperasionalkan sumber daya alam yang dimiliki dengan tujuan hasilnya lebih maksimal. Sehingga setiap pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan sektor perekonomian daerahnya melalui pengelolaan objek wisata yang dimiliki.

Keterlibatan masyarakat sebagai aktor utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan, sejalan dengan prinsip *Community Based Tourism* (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. *Community Based Tourism* merupakan industri yang mengedepankan dampak terhadap komunitas (masyarakat) dan lingkungan. Selain meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata, *Community Based Tourism* (CBT) juga mampu memberikan dampak yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Dampak tersebut meliputi pada ekonomi, sosial, dan yang lebih penting lagi adalah lingkungan wisatanya. Ridwan (2012:34) menambahkan, pengembangan usaha pariwisata lokal masih belum maksimal, sebab masyarakat sekitar daerah pariwisata tidak mempunyai pendanaan dan keahlian yang mumpuni untuk mengelola potensi pariwisata, atau ikut terjun langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata yang berbasis alam dan budaya.

Adimihardja (dalam Sunaryo, 2013:215) berpendapat bahwa memberdayakan dapat menjadi proses untuk berkontribusi dalam peningkatan perekonomian dari sumber daya manusia (SDM) yang dianggap kurang produktif, dan mampu meningkatkan kepercayaan diri, status sosial dan martabat seseorang dimata sosial. Selain

itu pemberdayaan juga mampu meningkatkan nilai-nilai budaya daerah tersebut untuk bisa dikenal lebih luas.

Untuk mewujudkan pelaksanaan pengembangan desa wisata yang baik maka perlu adanya komunikasi, baik dari pihak pemerintah desa maupun masyarakat setempat. Terjalannya komunikasi yang baik dalam proses kerjasama antar aktor yang terlibat dapat mewujudkan terciptanya desa wisata yang berkelanjutan. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan yaitu melalui model kolaborasi atau *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan teori yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. *Collaborative governance* merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *collaborative governance* menciptakan kepemilikan bersama terhadap masalah tersebut. Ansell dan Gash (2007:543) menyebutkan bahwa *collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat berbagai pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama. Selanjutnya Ansell dan Gash mendefinisikan *collaborative governance* sebagai sebuah aransemen tata kelola pemerintahan yang mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Dalam prosesnya, pemerintah desa memiliki peran penting dalam upaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Wiwiek Robiatul Adawiyah dkk pada penelitian yang berjudul "*Strategi pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (community based rural tourism) di desa Papringan*" dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melalui kepala desa menjadi motor penggerak perubahan perilaku aparat desa dan masyarakat lokal. Peran pemimpin sangat kuat dalam perkembangan sebuah organisasi. Munculnya kesadaran pemerintah untuk ikut serta bertanggung jawab dalam perkembangan organisasi dapat meningkatkan perekonomian desa. Hal ini juga terjadi pada pengembangan desa wisata Setigi di Desa Sekapuk, Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Yang mana pemerintah desa melalui kepala desa menjadi motor penggerak kesadaran di bidang kepariwisataan untuk mendorong perekonomian desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Setigi juga merupakan upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya desa wisata Setigi yaitu sebagai upaya untuk mengentaskan pengangguran, kemiskinan dan memberdayakan masyarakat dalam ekonomi.

Desa Sekapuk yang terletak di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik merupakan salah satu desa yang mampu mencapai level sejahtera mandiri yang berada di Kabupaten Gresik. Keberhasilan Desa Sekapuk tidak lepas dari keberhasilan pengembangan di sektor wisata desa. Pengembangan desa wisata Setigi mampu mendongkrak perekonomian desa dan menjadi penyumbang tertinggi pendapatan asli desa. Berdasarkan data yang di dapat dari *kanaldesa.com*, bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk didapatkan dari 68 persen pengelolaan wisata desa, 22 persen Dana Desa (DD), 7 persen Alokasi Dana Desa (ADD), dan sisanya 3 persen dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP), dampak dari adanya pengelolaan desa wisata Setigi Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk setiap tahun terus mengalami peningkatan. (Alamsyah, M. Taufiq, 2020).

Tabel 1. PADes Desa Sekapuk

Tahun	PADes Desa Sekapuk
2018	Rp 575,7 Juta
2019	Rp 929 Juta
2020	Rp 1,4 Miliar

Sumber: *kanaldesa.com*

Keberhasilan pengembangan desa wisata Setigi menjadikan Desa Sekapuk sebagai percontohan desa wisata, hal ini disampaikan langsung oleh menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam kunjungannya ke Setigi. Seperti yang dikutip dari *Antaranews*,

“Saya mengajak semua warga desa, sahabat desa untuk datang ke sini, baik itu aparat desa pengurus BUMDesa, pengelola desa wisata, disamping berwisata, silahkan belajar dari pengalaman Pak Kades Sekapuk dalam melakukan inovasi,” kata Abdul Halim. (Antaranews, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021).

Setigi merupakan salah satu desa wisata yang berada di kabupaten Gresik. Berjarak 34 km dari pusat Gresik dan dapat ditempuh dalam waktu 53 menit sampai 1 jam. Berdiri di tanah desa seluas 5 hektar dan memiliki konsep bernuansa alam buatan. Setigi memiliki kepanjangan Selo (batu), Tirto (air), Giri (bukit). Sesuai dengan namanya Setigi memang berada di perbukitan kapur, desa wisata Setigi sudah ramai bahkan sebelum resmi dibuka pada awal tahun 2020. Agar lebih menarik, desa wisata Setigi dilengkapi dengan danau buatan, jembatan peradaban, miniatur masjid Persia dan ornamen pahatan, ada Patung Gupala, Dwarapala, Candi Topeng Nusantara, dan Patung Semar. Kemudian ada juga Tidak hanya itu, seiring dengan pembangunan yang terus berjalan terdapat banyak wahana baru seperti kolam renang khusus wanita dan

anak-anak dan juga pusat kuliner yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Mulanya, Setigi merupakan tempat bekas tambang kapur dan tempat pembuangan sampah masyarakat Desa Sekapuk. Dengan pengelolaan yang matang dan terkonsep, Desa Sekapuk mampu memberikan nilai tambah dari fungsi bekas tambang kapur. Setigi merupakan wujud nyata keberhasilan pengembangan wisata desa berbasis partisipasi masyarakat. Hal itu disampaikan langsung oleh kepala Desa Sekapuk Abdul Halim. Seperti yang dikutip dari *kompas.com*,

“... tempat wisata ini, dulunya merupakan tempat warga membuang sampah, dari 2003 hingga 2017. Tapi mulai 2018 kami swadaya bersama warga Desa Sekapuk membersihkan sampah, karena saya punya bayangan tempat ini cocok digunakan untuk tempat wisata. Lihat saja, pemandangannya cukup indah kan?” Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim (Kompas.com, diakses pada tanggal 16 November 2021).

Dalam pelaksanaannya, desa bergerak secara mandiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah daerah maupun bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Untuk mewujudkan wisata yang maksimal, tentu membutuhkan banyak biaya, dan tidak mungkin membebankan pada kas desa dan iuran seikhlasnya warga. Oleh karena itulah, sebagai upaya untuk menyukseskan pembangunan desa wisata Setigi, pemerintah desa mencoba menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disepakati bersama melalui Taplus Invest Setigi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Abdul Halim selaku kepala desa yang di kutip dari *desasekapuk.com* yang menyatakan bahwa hadirnya Taplus Invest dilakukan melalui diskusi atau musyawarah desa bersama perwakilan masyarakat terkait persoalan modal berupa dana untuk pembangunan wisata Setigi. Pada saat itu ada beberapa opsi yang disampaikan namun setelah dipertimbangkan dan dipikirkan konsekuensinya maka dipilihlah Taplus Invest dengan konsep kepemilikan modal dimana yang memiliki modal adalah masyarakat itu sendiri.

Dengan konsep tersebut pemerintah desa mencoba menawarkan kepada masyarakat yang ingin menyumbang dana awal untuk pembangunan desa wisata Setigi. Selain itu, untuk melakukan pengelolaan desa wisata Setigi pemerintah desa kemudian mendirikan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa). Dengan adanya BUMDesa maka diharapkan desa wisata dapat dikelola secara profesional dengan manajemen yang baik. BUMDesa sendiri diatur dalam Perdes (Peraturan Desa) Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisata Desa Sekapuk.” sehingga pengelola desa wisata adalah

masyarakat sendiri melalui BUMDesa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat selalu dilibatkan dalam pengelolaan desa wisata Setigi. Sehingga pemerintah desa tidak bergantung pada banyaknya investor dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata Setigi. Selain sebagai sumber dana untuk wisata, BUMDesa Desa Sekapuk juga berperan sebagai pengolah utama Desa Wisata Setigi.

Keberhasilan pengembangan desa wisata Setigi tidak lepas dari peran serta pemerintah desa dan juga partisipasi masyarakatnya. Keikutsertaan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keberhasilan pengembangan desa wisata Setigi. Partisipasi masyarakat dapat bersifat *top down* maupun *bottom up*. Bisa juga bersifat manipulatif ataupun spontan bergantung pada bagaimana proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam prosesnya, masyarakat lokal yang kemudian melakukan pembangunan, memiliki dan mengelola langsung fasilitas serta melakukan pelayannya. Untuk memaksimalkan pengelolaan desa wisata Setigi maka pemerintah desa harus bersinergi dengan masyarakat. Sehingga dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengembangannya, desa wisata Setigi mampu berkembang menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan. Hal ini juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Desa Sekapuk. Tersedianya banyak lapangan pekerjaan baru, meningkatnya taraf hidup masyarakat dan status baru Desa Sekapuk sebagai Desa Sejahtera Mandiri bahkan Desa Sekapuk mampu mendeklarasikan diri sebagai desa Miliarder pertama di Kabupaten Gresik, hal ini menjadi bukti nyata dari keberhasilan pengembangan desa wisata Setigi. Disamping itu, pengembangan desa wisata Setigi berbasis masyarakat, tanpa adanya investor selain masyarakat sendiri berdampak pada besarnya ketergantungan pengembangan desa wisata Setigi terhadap partisipasi masyarakat. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.”

Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi instansi terkait dalam implementasi kebijakan Desa Wisata Setigi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Sekapuk Kecamatan

Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Dan secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi mulai dari perencanaan awal ide, pelaksanaan ide, hingga pengelolaan desa wisata Setigi. Fokus pada penelitian ini berdasarkan pada tiga aspek pembentukan desa wisata yaitu, potensi desa, minat dan kesiapan masyarakat sekitar, dan ide atau konsep yang ditawarkan harus unik dan berbeda dari yang lain. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau informan. Data primer pada penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi. Sumber data sekunder dapat bersumber dari media massa baik cetak maupun elektronik (namun dalam penelitian ini banyak menggunakan sumber data elektronik), monografi kelurahan Sekapuk, salinan Perdes (Peraturan Desa) Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisata Desa Sekapuk”, serta laporan-laporan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Pemilihan dan penetapan lokasi adalah di desa wisata Setigi Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi berdasarkan bahwa wilayah ini memiliki objek wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah desa setempat dan melibatkan masyarakat lokal untuk turut berpartisipasi dalam proses pengembangannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pewawancara dan narasumber dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses implementasi kebijakan desa wisata Setigi yaitu kepala desa sebagai konseptor yang menawarkan ide dan gagasan, BUMDesa selaku pengelola objek wisata Setigi, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam pengembangan desa wisata Setigi. Selanjutnya, observasi digunakan untuk melakukan sinkronisasi antara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keadaan atau data di lapangan (kondisi yang sebenarnya). Dan yang terakhir, dokumen digunakan

sebagai data pendukung penelitian yang merupakan juga merupakan salah satu cara dalam triangulasi data. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai dokumen seperti salinan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kebijakan desa wisata Setigi. seperti salinan peraturan desa tentang rencana pembangunan kepariwisataan Desa Sekapuk serta dokumen lain yang masih relevan.

Penelitian ini menggunakan multiple triangulasi meliputi triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Triangulasi Sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah didapatkan dari beberapa sumber kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274). Bisa dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isu yang tercatat pada dokumen yang berkaitan, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pandangan orang lain dalam berbagai strata sosial yang berbeda. Selanjutnya, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik atau metode yang berbeda. Dan yang terakhir merupakan triangulasi teori, yaitu triangulasi yang dapat ditempuh melalui penggunaan beberapa teori yang relevan ketika dalam proses analisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah reduksi data, menyajikan data, dan melakukan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Wisata Setigi

Desa wisata Setigi merupakan salah satu destinasi wisata berbasis alam yang berkembang di Kabupaten Gresik. Tepatnya berada di Jalan Raya Deandles No. 33-88 Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Sama seperti namanya Setigi berasal dari kata Selo, Tirto, dan Giri yang kemudian disingkat Setigi dan masing-masing memiliki arti Selo berarti batu, Tirto berarti air, dan Giri berarti bukit. Memiliki luas wilayah seluas 5 hektar, desa wisata Setigi berbatasan langsung dengan pemukiman warga dan tambang kapur yang masih aktif di sebelah utara, bagian timur merupakan jalan utama Desa Sekapuk, bagian barat merupakan tambang kapur yang masif aktif, dan bagian selatan merupakan pemukiman warga.

Desa wisata Setigi memiliki berbagai spot foto yang memanjakan mata pengunjungnya. Mulai dari danau buatan, jembatan peradaban, tangga derajat, museum batu karst, panggung batu, kolam banyu gentong, pemandian hijabers, miniatur masjid persia dan ornamen pahatan diantaranya ada patung gupala, dwarapala, candi topeng

nusantara, dan patung semar. Berbagai fasilitas juga didapatkan oleh pengunjung apabila berkunjung di desa wisata Setigi diantaranya, selfie area, outbound, tempat makan, balai pertemuan, lahan parkir yang luas, cafetaria, kamar mandi umum, kios souvenir, kuliner, mushola, wifi area, dan lahan terbuka hijau yang luas.

Sebelum menjadi desa wisata, Setigi merupakan tempat pasca tambang kapur yang terbengkalai cukup lama sehingga di lokasi ini terdapat banyak lubang yang kemudian dijadikan tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar tahun 2007-2017.

Selama 10 tahun dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat terjadi masalah lingkungan yang semakin serius, salah satunya bau tidak sedap yang kerap hadir pada saat musim penghujan tiba. Tidak hanya itu, lokasi bekas tambang tersebut semakin tidak produktif dan membuat wajah desa semakin tidak indah. Pembangunan desa wisata Setigi dilakukan pada awal 2018 dan dibuka secara resmi pada tahun 2020 oleh kepala desa Abdul Halim setelah sempat ditutup selama kurang lebih dua bulan akibat pandemi covid-19, kini desa wisata Setigi kembali bangkit di era new normal.

Ide Desa Wisata Setigi oleh Kepala Desa

Desa wisata Setigi merupakan wujud realisasi janji kampanye Abdul Halim selaku kepala desa terpilih. Pembangunan objek wisata di Desa Sekapuk masuk dalam visi misi Abdul Halim dalam pencalonan kepala desa di Desa Sekapuk. Visi misi tersebut dituangkan dalam “Pancasona” yang kemudian menjadikan pembangunan wisata sebagai prioritas utama. Pancasona sendiri memiliki lima poin yaitu Pembangunan kepariwisataan desa, Pembangunan menara masjid, Penyediaan lapangan kerja/produk unggulan, Pembangunan gedung serbaguna, Target net profit BUMDesa 1,2 M/Tahun. Menurut Abdul Halim selaku kepala desa mengungkapkan bahwa Pancasona merupakan wujud kinerja yang berasal dari Pancasila. Abdul Halim mengungkapkan bahwa pembangunan desa wisata Setigi merupakan ide gila untuk membangun desa. Abdul Halim menyebut bahwa dengan adanya wisata di desa maka akan memiliki multi efek bagi perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pencalonannya sebagai kepala desa yaitu mengentaskan pengangguran dan kemiskinan di Desa Sekapuk. Namun, ada kisah lain dibalik pencalonannya dalam pemilihan kepala desa kala itu. Abdul Halim mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki pengalaman dalam dunia politik khususnya dalam menjadi kepala desa, ketua RT bahkan RW. Dan Abdul Halim tidak memiliki niatan untuk maju dalam pemilihan kepala Desa Sekapuk

Sebagai kepala desa terpilih, Abdul Halim mencoba menyelesaikan permasalahan terkait pencemaran lingkungan di Desa Sekapuk yang disebabkan oleh timbunan sampah masyarakat di lokasi bekas tambang kapur. Pencemaran lingkungan tersebut merupakan realita yang dihadapi Abdul Halim selaku masyarakat Desa Sekapuk. Untuk itu Abdul Halim mencoba menawarkan ide untuk mengubah lokasi non produktif tersebut dengan dikelola menjadi tempat yang lebih produktif dan bernilai ekonomi dengan dibangunnya objek wisata di tempat bekas tambang yang dialih fungsikan sebagai tempat pembuangan sampah oleh masyarakat Desa Sekapuk. Desa wisata Setigi merupakan gagasan yang dapat menyelesaikan tiga permasalahan yang ada sekaligus yaitu, lahan bekas tambang, bekas pembuangan sampah dan mengentaskan pengangguran warga.

Pada awal tahun 2018 perubahan besar mulai terjadi. Sejak terpilihnya Abdul Halim sebagai kepala desa, pemerintah Desa Sekapuk melalui kepala desa mengajak warga masyarakat untuk merubah pola pikir terkait kondisi lingkungan yang terus mereka keluhkan. Tidak hanya itu, pemerintah desa melalui kepala desa terus berupaya membangun komunikasi untuk selalu melibatkan masyarakat Desa Sekapuk dalam upaya implementasi kebijakan desa wisata Setigi melalui berbagai tahap hingga terwujud desa wisata Setigi yang dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Komunikasi Ide dalam Musyawarah Desa

Abdul Halim menjadikan musyawarah desa sebagai jembatan komunikasi dengan masyarakat desa. Musyawarah desa merupakan agenda rutin Desa Sekapuk yang sudah ada sejak sebelum Abdul Halim terpilih sebagai kepala desa baru. Musyawarah desa ini dilaksanakan pada tanggal satu pada setiap bulannya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan program kerja dan visi misi setelah terpilih, maka Abdul Halim selalu berkomunikasi dengan masyarakat baik yang ada di pemerintahan seperti BPD ataupun dengan masyarakat umum melalui perwakilan RT RW. Sebelum pemerintahan Abdul Halim musyawarah desa sudah rutin dilaksanakan dan sudah menjadi budaya bagi pemerintahan Desa Sekapuk. Pihak-pihak yang terlibat dalam musyawarah desa ini antara lain adalah pemerintah desa, BPD, RT RW, dan lembaga masyarakat desa lainnya. Musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas berbagai hal terkait pengembangan kebijakan desa wisata Setigi, mulai dari pada tahap perencanaan kebijakan mengenai pembangunan desa wisata Setigi hingga tahap evaluasi perkembangan desa wisata Setigi.

Pada akhir Desember 2017 setelah dilantik menjadi kepala desa terpilih, Abdul Halim langsung melaksanakan pertemuan pertamanya melalui musyawarah desa pada 1

Januari 2018. Di Awal komunikasinya bersama masyarakat, banyak respon terhadap ide mengenai pembangunan desa wisata Setigi. Tidak hanya respon positif namun juga cibiran yang diberikan kepada kepala desa. Berbagai respon negatif tersebut didasarkan pada keadaan BUMDesa sebelum Abdul Halim menjabat. Saat itu, gaji ketua BUMDesa saja hanya 500 ribu per bulan. Tidak hanya itu, banyak warga yang melakukan aksi anarkis dengan mencoret-coret bahkan membakar fasilitas yang sudah ada.

Berikut merupakan dokumentasi untuk musyawarah desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat,



Gambar 1. Musyawarah Desa Rutin Bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Sumber: *Instagram Official Kepala Desa (@abdhalim_12)*

Melalui gambar 1, dapat diketahui bahwa pemerintah desa selalu membangun komunikasi bersama masyarakat melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah desa tersebut turut hadir perwakilan masyarakat RT RW, BUMDesa, dan BPD.

Aktivitas Partisipasi Secara Terstruktur

Setelah dilantiknya Abdul Halim sebagai kepala desa terpilih maka pemerintah desa bergegas untuk merealisasikan program kerja yang telah dibuat salah satunya yaitu mewujudkan pembangunan desa wisata Setigi. langkah pertama yang dilakukan aparat desa adalah dengan bersinergi bersama masyarakat melalui kerja bakti untuk membersihkan sampah di lokasi tersebut. Kerja bakti yang dilakukan merupakan hasil dari keputusan bersama antara masyarakat desa dan juga pemerintah desa.

Dibutuhkan 10 bulan untuk membersihkan sampah secara total dari lokasi bekas tambang. Disamping pembersihan sampah dan lokasi yang terus dikerjakan dilaksanakan pula proses pembangunan beberapa objek atau spot foto untuk desa wisata Setigi. spot foto awal yang dikerjakan adalah jembatan peradaban, danau peradaban, dan candi banyu gentong. Masyarakat turut serta dalam membangun berbagai spot foto di lokasi. Dalam prosesnya sesuai dengan kesepakatan bersama disepakati bahwa

pelaksanaan pembangunan tidak menggunakan konsultan baik dari luar maupun dari dalam daerah Gresik. Semua konsep mengikuti arahan dari kepala desa dan tentunya telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat melalui musyawarah desa.

Kepala desa terpilih mempunyai target bahwa desa wisata Setigi akan memiliki setidaknya 24 spot foto saat pembukaan. Sehingga ditargetkan bahwa setiap bulan akan ada dua spot foto baru yang rampung dibangun. Pada awal tahun 2020 desa wisata Setigi sudah dibuka untuk umum. Pada awal pembukaannya kondisinya masih 50% dari pengerjaannya, namun minat dan antusias pengunjung saat itu terbilang cukup tinggi. Kerja bakti telah disepakati bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Sekapuk melalui musyawarah desa. Setiap akhir pekan secara bergilir per RT RW akan di adakan kerja bakti di lokasi bekas tambang untuk membersihkan sampah. Pada awal pembangunan, kerja bakti dilaksanakan oleh semua masyarakat Desa Sekapuk tanpa adanya jadwal bergilir. Pada pelaksanaannya semua masyarakat membaaur menjadi satu dengan satu komando oleh Pak Kades.

Berikut merupakan dokumentasi aktivitas kerja bakti yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat,



Gambar 2. Kerja Bakti membersihkan lokasi bekas tambang Sumber: Facebook Official Kepala Desa (Abdul Halim)

Sesuai dengan gambar 2, dapat diketahui bahwa pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk tenaga melalui kerja bakti yang telah disepakati sebelumnya di musyawarah desa.

Investasi Warga Desa

Dalam proses pembangunan desa wisata Setigi tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, pada saat itu pemerintah desa sudah berusaha meminta bantuan kepada pemerintah daerah namun tidak ada tanggapan berarti dari pemerintah daerah. Tanpa adanya bantuan dana baik dari pemerintah daerah maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan maka otomatis pemerintah Desa Sekapuk harus berusaha lebih keras untuk memenuhi dana agar pembangunan tetap bisa

dilaksanakan. Pemerintah desa kemudian membangun komunikasi dengan masyarakat melalui musyawarah desa membahas mengenai modal dana untuk pembangunan wisata Setigi.

Hasil dari musyawarah yang dilakukan tersebut adalah disepakati bahwa untuk memenuhi dana pembangunan desa wisata Setigi akan dilakukan secara gotong royong melalui iuran. Untuk mengontrol iuran warga maka pemerintah desa membuat sebuah wadah yang kemudian disebut dengan Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest). Sehingga warga dapat menabung sekaligus berinvestasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan desa wisata Setigi. Tujuan dibentuknya Taplus Invest ini adalah agar masyarakat Desa Sekapuk juga merasakan hasil dari pengembangan desa wisata Setigi, sehingga konsep dari masyarakat dan untuk masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Taplus Invest merupakan opsi ketiga yang diambil oleh kepala desa dan masyarakat untuk memenuhi modal dalam pembangunan desa wisata Setigi. Selain opsi ketiga ini ada beberapa opsi lain yang muncul saat musyawarah desa. Pada opsi pertama, ada yang mengusulkan menggunakan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD). Namun opsi ini tidak digunakan dengan alasan bahwa apabila menggunakan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) maka hasil pembangunan dan pengembangan desa wisata Setigi akan masuk pada kas pemerintah dan masyarakat tidak mendapatkan manfaat secara langsung terlebih lagi pembangunan akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Selain itu, dengan menggunakan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Dana Desa (DD) maka pembangunan yang telah direncanakan akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena pembangunan desa wisata Setigi akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga tidak akan cukup dalam waktu satu bahkan dua tahun jika menggunakan Dana Desa (DD). Pihak pemerintah menginginkan pembangunan dapat dilakukan dengan cepat sehingga hasilnya cepat dirasakan oleh masyarakat.

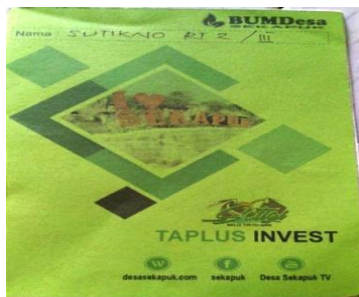
Opsi kedua, melibatkan investor dari luar desa. Opsi ini dapat diambil apabila menginginkan percepatan pembangunan fisik untuk desa wisata Setigi, namun dengan melibatkan investor dari luar desa maka semua keuntungan akan banyak masuk ke investor dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang diharapkan.

Sehingga di pilihlah opsi ketiga, yaitu Taplus Invest atau Tabungan Plus Investasi. Dengan Taplus Invest ini pemerintah desa mengajak segenap masyarakat untuk menabung sekaligus berinvestasi untuk desa wisata Setigi, sehingga masyarakat diarahkan untuk menjadi nasabah. Setelah satu tahun menabung melalui Taplus Invest maka uang yang terkumpul tidak akan berkurang satu rupiah.

Saat itu pemerintah desa memberikan jaminan bagi masyarakat yang menabung di Taplus Invest dengan Peraturan Kepala Desa (Perkades).

Taplus Invest ini merupakan program yang tidak wajib bagi setiap warga Desa Sekapuk. Tidak ada denda ataupun sanksi bagi warga yang memang tidak ingin menabung di Tplus. Seperti yang disampaikan oleh ibu Anik selaku warga masyarakat yang tidak ikut menabung. Beliau mengungkapkan bahwa alasan tidak ikut dalam program investasi untuk desa wisata adalah karena tidak memiliki penghasilan tetap.

Tabungan yang telah dikumpulkan tersebut akan dirupakan menjadi surat saham. Di awal pelaksanaannya hanya sekitar 10% saja dari masyarakat Desa Sekapuk yang ikut berpartisipasi, yaitu hanya 250 Kartu Keluarga (KK) dari 1.614 Kartu Keluarga (KK) saja kemudian bertambah menjadi 420 Kartu Keluarga (KK) ikut berpartisipasi dalam Taplus Invest. Sehingga terkumpul 1000 surat saham dari 420 Kartu Keluarga (KK). sehingga dilakukan perubahan bahwa setiap Kartu Keluarga (KK) boleh ikut menabung lebih dari lima dan maksimal memiliki sepuluh surat saham. Abdul Halim menyampaikan bahwa Taplus pertama kali dijalankan pada awal tahun 2019 yaitu Januari dan selesai satu tahun tepatnya pada 31 Desember 2019. Dan setelah dana warga terkumpul kemudian digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur di desa wisata Setigi. dan untuk bagi hasilnya akan didapatkan pada akhir tahun 2020. Berikut merupakan dokumentasi buku tabungan salah satu warga di Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest),



Gambar 3. Buku Tabungan Masyarakat Untuk Setigi

Sumber: Novfita Bobsuni, 2020

Berdasarkan gambar 3, dapat diketahui bahwa pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berinvestasi untuk desa wisata Setigi. Hal ini jelas tercermin dari sampul buku tabungan tersebut.

Pengelolaan Desa Wisata Setigi oleh BUMDesa

Pengelolaan desa wisata Setigi dilakukan oleh BUMDesa Desa Sekapuk. BUMDesa sendiri diatur dalam Perdes (Peraturan Desa) Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 tentang "Rencana Pembangunan Kepariwisata Desa Sekapuk." BUMDesa dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa dan dibentuk berdasarkan

kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Sebagai pengelola utama desa wisata Setigi BUMDesa juga berperan sebagai sumber dana dalam pembangunan dan pengelolaan desa wisata Setigi.

Sebagai sumber dana utama bagi pengelolaan dan pengembangan desa wisata Setigi, BUMDesa bertanggung jawab dalam mengelola tabungan rutin warga dalam Taplus Invest. Dimana warga akan menabung kepada ketua RT kemudian RT yang akan menyetorkan tabungan warga ke BUMDesa setiap bulannya.

BUMDesa Sekapuk memiliki 6 unit usaha. Yaitu Unit Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Unit Kebersihan Desa, Lembaga Keuangan Multijasa, Unit Usaha Lahan Garapan Tambang, Unit Pariwisata Desa dan Unit Sarana dan Prasarana Olahraga Terpadu. Unit-unit tersebut banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Sekapuk, sehingga membuat tingkat pengangguran Desa berkurang drastis. Dari ke 6 unit usaha tersebut, Unit Pariwisata Desa merupakan penyumbang pendapatan tertinggi bagi BUMDesa.

Selain itu, BUMDesa juga memiliki target untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa Sekapuk sehingga dengan adanya pariwisata di desa dapat membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah desa memiliki target untuk dapat menyerap banyak tenaga kerja melalui wisata desa dan hal ini juga dilakukan secara bertahap. Di dalam wisata saat ini ada sekitar 61 UMKM dengan rincian 32 stan dan pembuatan produk dari PKK, ada sekitar 29 UMKM di seluruh RT. Di setiap RT itu ada sekitar 5 UMKM. Dari 61 UMKM itu berhasil menyerap tenaga kerja sampai 209 orang." Jelas Efendi selaku manajer BUMDesa (wawancara, 19 April 2022)

BUMDesa Desa Sekapuk memiliki visi untuk menjadikan BUMDESA Sekapuk sebagai lambang usaha desa yang berkualitas yang mampu melayani masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam upaya pengelolaan desa wisata Setigi, BUMDesa selalu melibatkan masyarakat lokal, seperti kerjasama yang dilakukan dengan berbagai lembaga masyarakat seperti PKK untuk sentra kuliner di dalam wisata, LINMAS, dan BPD yang masing-masing lembaga tersebut memiliki tempat atau bagian di dalam pengelolaan desa wisata Setigi yakni dengan memiliki stand di desa wisata Setigi.

Keanggotaan BUMDesa merupakan warga masyarakat Desa Sekapuk yang memiliki syarat untuk menjadi bagian dari BUMDesa. Selain itu semua pekerja yang bekerja di tempat wisata Setigi merupakan masyarakat asli Desa Sekapuk. Dalam pemilihan struktur keanggotaan di dalam BUMDesa dilakukan secara musyawarah yang dihadiri oleh perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Selain itu BUMDesa juga menerapkan beberapa himbauan atau

aturan kepada setiap penjual di desa wisata Setigi untuk tidak membuat harga sendiri dalam berjualan, karena harga sudah ditentukan oleh BUMDesa. Hal ini untuk mengantisipasi kesenjangan antar pedagang dan juga demi kenyamanan pengunjung. Dalam pelaksanaannya, setiap RT mendapatkan bagian masing-masing satu stan untuk pengelolaannya kemudian diserahkan pada kebijakan masing-masing RT. Untuk menu makanan yang dijual juga disesuaikan dengan kemampuan warga di setiap RT. Tidak ada larangan berarti untuk setiap pedagang di dalam desa wisata, mereka hanya di himbau untuk tidak bermain di harga dan supaya selalu menjaga kebersihan tempat wisata. Dari penjelasan yang disampaikan oleh manajer BUMDesa yaitu bapak Efendi, dapat diketahui bahwa dengan hadirnya desa wisata maka dapat mengurangi pengangguran yang ada di Desa Sekapuk. Karena semua pekerja yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata Setigi merupakan masyarakat Desa Sekapuk.

Aktivitas Masyarakat dalam Pokdarwis

Pokdarwis merupakan wujud kesadaran masyarakat terhadap manfaat atau keuntungan yang didapatkan dengan adanya desa wisata Setigi di Desa Sekapuk. Salah satu manfaat yang nyata dirasakan oleh masyarakat desa yaitu meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes). Pada tahun 2018 Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk sebesar Rp 575,7 Juta, angka ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk mencapai Rp 929 Juta. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan hingga sebesar 61,3% dari tahun sebelumnya. Hingga tahun 2020, Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk menyentuh angka Rp 1,4 Miliar. Dengan presentasi peningkatan sebesar 50% dari tahun sebelumnya. Walau presentasi peningkatan menurun dari tahun sebelumnya namun angka ini terbilang cukup besar untuk kepariwisataan. Hal ini dikarenakan desa wisata Setigi juga ikut merasakan dampak dari adanya Covid-19.

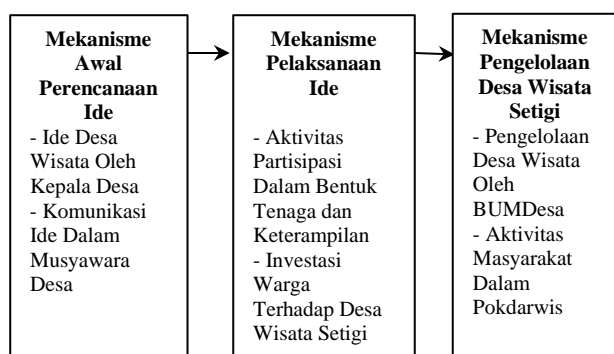
Dengan berbagai kemajuan dan capaian yang didapatkan oleh desa wisata Setigi maka masyarakat kemudian sadar bahwa wisata dapat memberikan mereka keuntungan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam kata lain dengan adanya wisata di Desa Sekapuk maka memunculkan sebuah organisasi yang sadar akan wisata yang ada, organisasi ini kemudian diberi nama Pokdarwis Pelangi desa wisata Setigi yang merupakan kepanjangan dari Kelompok Sadar Wisata Pelangi. Pokdarwis Pelangi dibentuk pada tahun 2018 oleh kepala Desa Sekapuk. Organisasi ini menjadi wadah bagi pemuda pemudi Desa Sekapuk yang berminat secara sukarela dalam pengembangan dan pelestarian wisata yang dimiliki oleh Desa Sekapuk yaitu desa wisata Setigi.

Pokdarwis Pelangi memiliki visi terwujudnya Kelompok yang peduli akan kekayaan wisata, pengembangan wisata, serta menumbuhkan hubungan baik dengan pemerintah, dan masyarakat. Dengan jargon bangga terhadap wisata desa, menunjukkan bahwa keanggotaan Pokdarwis memang hadir dari kalangan masyarakat yang sadar akan manfaat dan keberlangsungan desa wisata desa. Berikut merupakan jargon Pokdarwis Pelangi “Kami anggota Pokdarwis Pelangi Stigi bangga dengan wisata desa, Setigi selalu dihati.”

Pokdarwis Pelangi memiliki berbagai kegiatan untuk mendukung kelestarian desa wisata Setigi, beberapa diantaranya melakukan reboisasi di lokasi wisata, menghias area wisata dengan spot-spot foto kece dan mengajak masyarakat melaksanakan aktivitas di lokasi wisata seperti senam pagi. Tidak hanya berkontribusi secara fisik, Pokdarwis Pelangi juga berkontribusi dalam promosi desa wisata Setigi. melalui media sosial mereka terus membagikan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan di dalam desa wisata Setigi dan juga repost ulang foto-foto pengunjung yang telah berkunjung ke desa wisata Setigi sehingga dengan model promosi melalui media sosial ini, diharapkan akan semakin banyak pengunjung yang tahu dan datang berkunjung.

Proses Pengembangan Desa Wisata Setigi

Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi terjadi melalui tiga mekanisme utama yaitu mekanisme dalam perencanaan ide yang terjadi dalam dua tahap yaitu tahap lahirnya ide oleh kepala desa dan tahap komunikasi ide dalam musyawarah desa. Mekanisme kedua yaitu mekanisme dalam pelaksanaan ide yang terjadi dalam dua tahap yaitu aktivitas partisipasi secara terstruktur melalui kerja bakti dan tahap pengumpulan dana masyarakat melalui Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest). Dan yang terakhir mekanisme dalam pengelolaan desa wisata Setigi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan tahap aktivitas masyarakat dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui bagan berikut,



Gambar 4. Mekanisme Partisipasi Dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi

Melalui gambar 4, dapat diketahui bahwa terjadi sebuah proses dalam partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi. Proses tersebut terjadi secara bertahap mulai dari mekanisme perencanaan ide hingga mekanisme pengelolaan desa wisata Setigi. Selain itu, juga diketahui

bahwa mekanisme partisipasi terjadi secara ditawarkan oleh aktor yang memiliki ide atau dalam hal ini adalah kepala desa untuk kemudian dilaksanakan oleh masyarakat.

Pembahasan

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dijelaskan, bahwa dalam pengembangan desa wisata maka harus ada tiga komponen yaitu adanya potensi wisata yang tersedia seperti lahan, lokasi, daerah serta ekosistem yang dapat membantu pengembangan destinasi wisata ke depan. Komponen kedua, yaitu minat dan kesiapan masyarakat sekitar. Komponen ketiga yaitu ide atau konsep desa wisata yang ditawarkan harus unik dan berbeda dari yang lain. Pengembangan desa wisata harus mengedepankan keikutsertaan masyarakat, karena pengembangan desa wisata harus mengintegrasikan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam struktur kehidupan masyarakat dan menyatu dengan tata cara serta tradisi masyarakat setempat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapati bahwa partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi dapat dilihat dalam tiga tahapan mekanisme yaitu mekanisme awal perencanaan, mekanisme pelaksanaan ide dan mekanisme pengelolaan desa wisata Setigi. Dalam mekanisme tersebut terdapat beberapa tahap yang dijalankan oleh masyarakat yaitu, mekanisme dalam perencanaan ide yang terjadi dalam dua tahap yaitu tahap lahirnya ide oleh kepala desa dan tahap komunikasi ide dalam musyawarah desa. Mekanisme kedua yaitu mekanisme dalam pelaksanaan ide yang terjadi dalam dua tahap yaitu

aktivitas partisipasi secara terstruktur melalui kerja bakti dan tahap penghimpunan dana masyarakat melalui Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest). Dan yang terakhir mekanisme dalam pengelolaan desa wisata Setigi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan tahap aktivitas masyarakat dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis Pelangi). Sehingga dalam penelitian ini tiga komponen penting dalam pengembangan desa wisata Setigi sudah terpenuhi.

Dari tahapan mekanisme partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi tersebut, maka didapatkan bahwa sebenarnya partisipasi yang terjadi dalam masyarakat Desa Sekapuk tersebut dikontrol oleh pemerintah desa, sehingga partisipasi yang muncul adalah partisipasi yang dikondisikan. Dan subjek yang mengkondisikan adalah aktor yang memiliki ide dalam perencanaan pengembangan kebijakan desa wisata Setigi yaitu kepala Desa Sekapuk Bapak Abdul Halim.

Dalam prosesnya Abdul Halim menjadi inisiator dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan Desa Sekapuk. Sehingga dalam penelitian ini, Abdul Halim sebagai aktor utama yang memiliki ide, tidak hanya itu kepala desa juga mengkonstruksi ide tersebut dalam musyawarah desa dan kemudian mengkoordinasikan ide kepada masyarakat. Sehingga dalam proses ini didapatkan bahwa mekanisme yang terjadi dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi berlangsung secara *top down*.

Apabila mekanisme terjadi secara *top down*, maka partisipasi masyarakat hanya bersifat responsif yaitu merespon apa yang telah ditawarkan oleh aktor yang memiliki ide dan bukan bersifat inovasi. Pada akhirnya mekanisme yang muncul yaitu mekanisme secara hegemoni. Dimana dorongan yang diberikan pemerintah desa tidak bersifat memaksa. Namun dalam prosesnya, partisipasi tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki semangat untuk ikut berpartisipasi dan ikut memiliki wisata desa.

Upaya yang dilakukan masyarakat dalam membangun semangat partisipasi dan bangga terhadap wisata desa dapat dilihat melalui pembentukan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa melalui Pokdarwis masyarakat merasa bangga dan ikut memiliki desa wisata Setigi. Hal ini tercermin dalam slogan Pokdarwis Pelangi yang mencerminkan kebanggaan anggotanya kepada wisata desa yaitu, “Kami Pokdarwis Pelangi Setigi bangga dengan wisata desa.”

Selain itu, partisipasi masyarakat melalui Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest) juga menunjukkan bahwa masyarakat ikut memiliki desa wisata Setigi, sehingga dapat membangun identitas bahwa desa wisata Setigi milik

masyarakat. Dalam Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest), pemerintah memberdayakan masyarakat sebagai pemilik modal terbesar. Dalam implementasi kebijakan desa wisata Setigi, partisipasi yang terjadi secara kondisional dan masyarakat berpartisipasi dengan merespon apa yang diinginkan oleh pemerintah desa.

Dalam proses ini, secara tidak langsung pemerintah desa sedang menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sekapuk. Selain itu, pemerintah desa juga melaksanakan edukasi kepada masyarakat desa. Karena dalam hal ini mekanisme yang ada terjadi secara terencana, tersusun dan sistematis. Hal ini dilakukan oleh pemerintah desa karena Sumber Daya Manusia (SDM) atau masyarakat tidak memiliki kecakapan seperti yang diharapkan. Sehingga pemerintah desa melalui kepala desa mengambil inisiatif untuk menawarkan ide yang telah disesuaikan dengan potensi baik masyarakat maupun lingkungan sekitar. Sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat menjadi upaya pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan kewisataan desa.

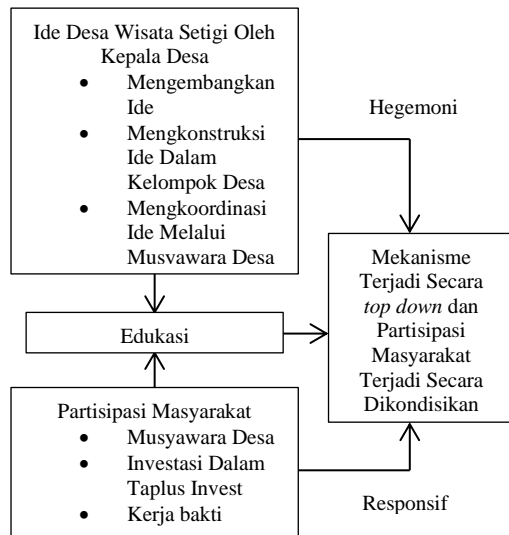
Dalam prosesnya masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek namun juga subjek dalam upaya pemberdayaan tersebut. Dalam kata lain, masyarakat tidak hanya menjalankan apa yang telah ditawarkan oleh struktur atau aktor yang memiliki ide namun masyarakat juga dilibatkan dalam setiap tahapan pelaksanaan ide. Dari data yang dikumpulkan dalam penelitian didapatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan desa wisata Setigi terjadi secara kondisional. Partisipasi kondisional merupakan bentuk partisipasi dimana masyarakat bukanlah sebagai pencetus ide namun partisipasi terjadi karena ada ide yang ditawarkan oleh aktor yang memiliki ide. Sehingga dalam kata lain partisipasi terjadi secara kondisional. Apabila ada ide atau aktor penggerak maka partisipasi akan terjadi, namun apabila tidak ada ide maka partisipasi tidak akan terjadi.

Proses partisipasi masyarakat didorong oleh ide yang ditawarkan oleh aktor yang memiliki wewenang atau dalam kata lain adalah struktur yang membuat kebijakan. Seperti halnya yang terjadi pada pengembangan desa wisata Setigi, dimana masyarakat berpartisipasi karena ada ide yang telah ditawarkan oleh kepala desa. Dalam teori kebudayaan kontemporer disebutkan bahwa dominasi struktur untuk mengalokasi kegiatan masyarakat dilakukan dengan mengandalkan kekuasaan yang memaksa, sehingga hasil nyata yang dicapai dinamakan "dominasi". Teori ini kemudian disampaikan oleh Antonio Gramsci dalam pemikirannya yang kemudian disebut sebagai hegemoni. Hegemoni merupakan sebuah rantai kemenangan yang didapatkan melalui mekanisme konsensus dan bukan melalui penindasan terhadap kelas

sosial lain. Hegemoni menurut Gramsci dikatakan sebagai hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan dan ideologis sehingga bukan dominasi dengan menggunakan kekerasan. Karena itulah hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang ditentukan. Hegemoni terjadi ketika masyarakat menerima dan meniru cara berfikir, cara hidup, dan pandangan kelompok yang mengeksploitasi mereka sehingga akan timbul kepatuhan dan sikap menerima keadaan (Gramsci, 2000:244).

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan desa wisata Setigi terjadi dalam beberapa tahap mulai dari tahap perencanaan hingga pengelolaan desa wisata Setigi. mekanisme pertama yaitu mekanisme dalam perencanaan ide yang terjadi dalam dua tahap yaitu tahap lahirnya ide oleh kepala desa dan tahap komunikasi ide dalam musyawarah desa. Mekanisme kedua yaitu mekanisme dalam pelaksanaan ide yang terjadi dalam dua tahap yaitu aktivitas partisipasi secara terstruktur dan tahap pengumpulan dana masyarakat melalui Tabungan Plus Investasi (Taplus Invest). Dan yang terakhir mekanisme dalam pengelolaan desa wisata Setigi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan tahap partisipasi masyarakat dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Adanya keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijakan kepariwisataan desa ini menjadikan IDM Desa Sekapuk menjadi meningkat dari angka 0,55% di tahun 2017 menjadi 0,88% di tahun 2020. Pada sektor ekonomi, unit usaha kepariwisataan menyumbang pendapatan tertinggi dalam Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk sebesar 68% tahun 2020. Tidak hanya itu Pendapatan Asli Desa (PADes) Desa Sekapuk juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun melalui sektor kepariwisataan. Hal ini menjadi bukti bahwa keberhasilan implementasi desa wisata Setigi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi namun juga pada kehidupan sosial masyarakat tidak merasa ditekan atau terpaksa untuk melaksanakan apa yang telah dikondisikan oleh pihak pemerintah desa. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyejahterakan masyarakat.



Gambar 5. Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Desa Wisata Setigi

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat terjadi secara kondisional dan bentuk dari keikutsertaan masyarakat dalam kepariwisataan desa adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sekapuk untuk menyejahterakan masyarakatnya. Mekanisme kondisional ini terjadi dalam tiga mekanisme yaitu mekanisme dalam perencanaan ide. Mekanisme pelaksanaan ide. Dan yang terakhir mekanisme dalam pengelolaan desa wisata Setigi.

Saran

Pemerintah Desa Sekapuk bisa lebih banyak melaksanakan kegiatan study banding dengan pihak pengelola desa wisata lain khususnya yang berada di Kabupaten Gresik, sehingga keberhasilan yang dicapai oleh desa wisata Setigi dapat menjadi contoh bagi masyarakat di daerah lain khususnya para pemangku kebijakan di desa lain dalam upaya mengembangkan kepariwisataan di daerahnya masing-masing.

Konsep Taplus Invest merupakan sebuah terobosan baru dalam pengelolaan desa wisata Setigi, namun dalam pelaksanaannya masih banyak warga yang belum ikut berpartisipasi dalam Taplus Invest dengan berbagai alasan. Sehingga akan lebih bijak pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam Taplus Invest dalam periode berikutnya. Sehingga akan lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat

dari implementasi desa wisata Setigi. Karena melihat perkembangan dan pertumbuhan Setigi yang semakin baik, tidak menutup kemungkinan akan ada banyak warga yang ingin ikut serta dalam menabung dan memiliki saham di desa wisata Setigi.

Sebaiknya pelatihan yang ada tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang sudah terlibat dalam pengembangan desa wisata Setigi namun juga kepada anak-anak muda Desa Sekapuk khususnya pada *fresh graduate* karena setiap tahun akan ada anak-anak muda dengan berbagai potensinya perlu mendapatkan wadah dan bimbingan dari pihak pemerintah khususnya pemerintah desa. Sehingga pihak pemerintah desa tidak hanya memberikan bantuan beasiswa kepada pemuda desa namun juga melakukan pendampingan sampai habis masa pendidikannya.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini dapat berjalan baik dari awal hingga akhir penyusunan artikel ini dikarenakan banyak pihak-pihak terkait yang turut membantu dalam menyelesaikan artikel ini. Untuk itu terimakasih kepada dosen pembimbing Ibu Maya Mustika Kartika Sari, Sos. M. IP yang telah memberikan waktu, tenaga, ilmu, dan juga motivasi mulai dari awal hingga akhir penelitian ini. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk Prof. Dr. Sarmini, M. Hum. Serta Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M. Si. selaku penguji yang telah memberikan waktu, saran dan masukannya pada penilaian artikel ini. Serta terimakasih kepada Bapak Abdul Halim selaku Kepala Desa Sekapuk, Ibu Ani selaku Sekretaris Desa Sekapuk, Bapak Efendi selaku manajer BUMDesa, dan pihak-pihak pemerintah desa lain. Serta masyarakat Desa Sekapuk yang telah meluangkan waktu, memberikan perhatian serta memberikan izin untuk dijadikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Y Awan, & Yudi Rusfiana. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabet.
- Ansell, Christopher. 2014. *Pragmatist Democracy: Evolution Learning as Public Philosophy*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Ansell, Cris, & Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Ansell, Cris, & Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Antaranews (2021, 15 Oktober). *Mendes PDTT jadikan Setigi Gresik percontohan desa wisata*. Diakses pada 16 November 2021, dari <https://m.antaranews.com/amp/berita/2462649/mendes-pdttd-jadikan-setigi-gresik-percontohan-desa-wisata>

- Arstein, Sherry R. 1969. A ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association (JAIP)*, 35(4), 2016-224.
- Artisa, A.R, Kirana, C.A.D. 2020. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu. *Jurnal Administrasi Publik*, 6 (1), 1-10.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Edisi terjemahan oleh Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- desabisa.com (2019, 2 Oktober). *Mengenal Konsep Community Based Tourism*. Diakses pada 15 November 2021, dari <https://www.desabisa.com/mengenal-konsep-community-based-tourism/>
- Gramsci, Antonio, 2000. *Sejarah dan Budaya*, Surabaya, Pustaka Prometheus.
- Hill, Michael, & Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy*. London: SAGE Publication Ltd.
- Inskeep, E. 1991. *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- jelajahgarut.com (2019, 23 September). *Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang Paling Banyak Dikunjungi Wisatawan Mancanegara, Indonesia Ke Berapa Ya?*. Diakses pada 14 November 2021, dari <https://www.jelajahgarut.com/negara-asia-tenggara-asean-yang-paling-banyak-dikunjungi-wisatawan-mancanegara-indonesia-ke-berapa-ya/>
- Kanaldesa.com (2020, 18 November). *Menengok "Desa Kaya" di Gresik, Jawa Timur*. Diakses pada 15 November 2021, dari <https://kanaldesa.com/artikel/menengok-desa-kaya-di-gresik-jawa-timur>
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Edisi terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: Remaja Resdekarya.
- Nurhidayati, Sri Endah. 2015. Studi Evaluasi Penerapan CBT Sebagai Pendukung Agrowisata Berkelanjutan. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 28(1), 1-10.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Perdes (Peraturan Desa) Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 tentang "Rencana Pembangunan Kepariwisata Desa Sekapuk."
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis dan Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Yin, Robert K. 2000. *Case Study Research: Design and Methods* (Edisi Terjemahan M. Djauzi Mudzakir). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.